



Article Informations
Corresponding Email:
haicalputra25@gmail.com

Received: 25/08/2025; Accepted:
10/01/2026; Published: 26/02/2026

FAKTOR-FAKTOR INDONESIA BERGABUNG DALAM BRICS PADA MASA KEPEMIMPINAN PRABOWO SUBIANTO

Haical Putra Mahardani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Indonesia bergabung dalam BRICS pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan meliputi Liberalisme, Interdependensi Kompleks, dan konsep Kebijakan Luar Negeri untuk menjelaskan dinamika kebijakan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga faktor utama: (1) faktor ekonomi berupa diversifikasi pasar, akses pembiayaan infrastruktur melalui New Development Bank, dan peningkatan perdagangan intra-BRICS; (2) faktor politik meliputi visi pembangunan nasional Presiden Prabowo serta upaya penguatan posisi tawar Indonesia di tataran global dan (3) faktor diplomasi berupa perluasan ruang gerak politik luar negeri bebas aktif serta peningkatan kerja sama Selatan-Selatan. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang strategis untuk memperkuat posisi global dan pembangunan ekonomi nasional, meskipun menghadapi tantangan harmonisasi regulasi, dominasi ekonomi Tiongkok, dan kesiapan kebijakan domestik.

Kata Kunci: Indonesia, BRICS, Prabowo Subianto, kebijakan luar negeri, pembangunan ekonomi

Abstract

This research analyzes the driving factors behind Indonesia's accession to BRICS under President Prabowo Subianto's leadership. Using a qualitative case study approach, the study applies Liberalism, Complex Interdependence, and Foreign Policy concepts to explain Indonesia's decision-making dynamics. The findings reveal three main factors: (1) economic factors, including market diversification, infrastructure financing through the New Development Bank, and intra-BRICS trade; (2) political factors, involving President Prabowo's national development vision and Indonesia's effort to strengthen its global bargaining position; and (3) diplomatic factors, focusing on expanding Indonesia's free and active foreign policy and enhancing South-South cooperation. Indonesia's BRICS membership offers strategic opportunities to bolster its global role and economic development, though challenges remain regarding regulatory harmonization, China's economic dominance, and domestic policy readiness.

Keywords: Indonesia, BRICS, Prabowo Subianto, foreign policy, economic development

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2009 BRICS didirikan atas kesadaran bahwa Lembaga internasional terlalu didominasi oleh kekuatan negara-negara barat yang maju dan tidak lagi memperhatikan negara-negara berkembang. BRICS dibentuk dengan alasan bahwa lembaga-lembaga Internasional terlalu terpengaruh oleh kekuatan barat dan tidak lagi memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang kini memiliki lima anggota negara baru, merupakan koalisi informal negara-negara berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam kerangka global. Koalisi ini tidak bersifat sebagai organisasi resmi, tetapi merupakan blok ekonomi yang tidak terikat pada Barat, yang menyelaraskan usaha di bidang ekonomi dan diplomasi untuk meraih tujuan bersama. Negaranegara BRICS berusaha menciptakan alternatif terhadap apa yang mereka anggap sebagai hegemoni pandangan Barat dalam kelompok multilateral penting, seperti Bank Dunia, G7, dan Dewan Keamanan PBB.

Pada 7 Januari, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang resmi menjadi bagaian dari BRICS, yang baru-baru ini membuka kesempatan untuk penambahan anggota termasuk Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab yang diterima pada tahun 2024. Keanggotaan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara dalam BRICS merupakan langkah meningkatkan daya saing di ekonomi Internasional serta memperluas jaringan kolaborasi dengan negara yang ekonominya sudah dianggap maju di dunia. Indonesia, dengan populasi 281.603,8 ribu jiwa pada 2024, adalah negara keempat terpadat di dunia dan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data Bank Dunia, PDB nominal Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari US \$ 1,3 triliun Rp. 22.319 triliun, menempatkannya di urutan ke-17 dunia. Proyeksi pertumbuhan PDB Indonesia 2024–2026 berada pada kisaran 4,8–5,2 % per tahun, didorong oleh konsumsi domestik, investasi infrastruktur, dan perbaikan *terms-of-trade* komoditas. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang 2024 mencapai Rp 1.714,2 triliun (sekitar US \$ 112 miliar), naik 20,8 % dari tahun sebelumnya, dan berhasil menyerap

2,4 juta tenaga kerja. Bank Indonesia juga melaporkan bahwa mitra investasi utama berasal dari negara-negara BRICS, terutama China dan India, menandakan ketertarikan investor baru pasca pengumuman rencana keanggotaan. Dalam hal perdagangan, nilai ekspor non-migas Indonesia ke lima negara pendiri BRICS pada 2024 mencapai US \$ 84,37 miliar, dengan China menyumbang US \$ 60,22 miliar, India US \$ 20,32 miliar, Brasil US \$ 1,72 miliar, Rusia US \$ 1,31 miliar, dan Afrika Selatan US \$ 0,78 miliar. Namun, neraca perdagangan Indonesia dengan blok BRICS masih defisit US \$ 1,63 miliar pada 2024, mencerminkan ketimpangan struktur ekspor-impor serta dominasi produk China di pasar domestik. Meskipun demikian, kebijakan diversifikasi pasar dan peningkatan nilai tambah industri diharapkan dapat membalikkan tren defisit sejalan dengan optimalisasi fasilitas perdagangan intra-blok dan penggunaan mata uang lokal yang digagas BRICS. Meski potensi akses pasar baru, sumber pembiayaan alternatif, dan diversifikasi mitra dagang sangat menjanjikan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius. Dominasi ekonomi China dalam BRICS tercermin dari pangsa 58 % total PDB anggota blok serta peran sentral Beijing dalam kebijakan internal BRICS, sehingga kebijakan kolektif cenderung mengakomodasi kepentingan .

2. GAMBARAN UMUM BRICS

Kelompok BRICS merupakan gabungan dari lima negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi cepat yaitu, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh ekonom Goldman Sach, Jim O'Neill, pada tahun 2001 dalam laporannya yang menyebut BRICS sebagai representasi negara-negara yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi global baru dalam beberapa decade mendatang. Keempat negara tersebut akhirnya menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi pertamanya di

Yekaterinburg, Rusia, pada Juni 2009, dan membentuk sebuah blok informal kerja sama strategis. Kehadiran Afrika Selatan pada tahun 2010 mengubah nama kelompok ini menjadi BRICS. Pembentukan BRICS tidak semata-mata didasarkan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mengkritik terhadap dominasi barat dalam sistem internasional, terutama dalam lembaga-lembaga keuangan global seperti *Internasional Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*. Negaranegara anggota BRICS melihat bahwa struktur ekonomi global yang kurang mencerminkan kepentingan dan aspirasi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, BRICS hadir sebagai alternatif kekuatan kolektif untuk mendukung sistem global yang inklusif, multipolar, dan adil. Tujuan utama BRICS pada tahap awal Adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan antar anggotanya, serta meningkatkan pengaruh politik kolektif mereka dalam sistem internasional. Namun seiring waktu agenda kerja sama BRICS berkembang meluas hingga mencakup bidang energi, teknologi, Kesehatan, perubahan iklim, hingga keamanan global. Pertemuan puncak tahunan (BRICS Summit) menjadi forum utama bagi para pemimpin anggota untuk Menyusun agenda kerja dan menyuarakan posisi bersama dalam isu-isu global. Kelebihan utama BRICS terletak pada keragaman latar belakang ekonomi, politik, dan regional yang justru menjadi sumber kekuatan dalam memperjuangkan kepentingan Global South (negara-negara selatan). BRICS secara kolektif mewakili lebih dari 40% populasi dunia, dan menyumbang lebih dari 25% PDB global menjadikan salah satu blok paling berpengaruh dalam dinamika ekonomi-politik internasional. Pembentukan BRICS juga menjadi refleksi dari pergeseran kekuatan global dari negara-negara barat ke negaranegara berkembang. Meskipun bukan organisasi formal seperti Uni Eropa, BRICS tetap memainkan peran penting dalam memperkuat solidaritas negara berkembang, mengadvokasi reformasi tata Kelola global, dan memperluas kerja sama ekonomi-politik di luar yang didominasi oleh barat. BRICS tidak hanya dilihat sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai proyek politik jangka panjang yang berupaya menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang dan merepresentasikan suara negara-negara yang selama ini direkomendasikan dalam pengambilan keputusan global.

2. Hubungan Kerja Sama Para Anggota BRICS

Kerja sama ekonomi menjadi fondasi yang mengikat negara-negara anggota BRICS dalam satu kerangka kepentingan bersama. Sejak awal pembentukannya forum ini dirancang untuk memberikan alternatif terhadap arsitektur ekonomi global yang selama ini dikuasai oleh negara-negara maju, khususnya melalui lembaga seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank*. Kesadaran akan ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi internasional inilah yang mendorong Brazil, Russia, China, India, dan kemudian Afrika Selatan untuk membentuk suatu blok yang mampu merepresentasikan aspirasi negara-negara berkembang di panggung global. Hubungan ekonomi antar anggota BRICS dibangun atas landasan empat prinsip inti yaitu kesetaraan, yang memastikan semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, non intervensi sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan nasional masing-masing negara, konsensus yang menekankan pengambilan Keputusan melalui musyawarah dan yang terakhir multilateralisme inklusif dengan tujuan membentuk tatanan internasional lebih adil serta mengakomodasi kebutuhan negara berkembang. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam merancang kebijakan ekonomi bersama dalam mengelola perdagangan dan mengatur arus investasi. Keterlibatan ekonomi antar anggota tidak sebatas pada transaksi perdagangan barang, tetapi meluas pada bidang investasi strategis, pembiayaan Pembangunan, pertukaran teknologi, hingga kolaborasi inovasi. Salah satu manifestasi konkret dari hubungan ekonomi adalah pembentukan *New Development Bank (NDB)* pada 2015, yang menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur dan Pembangunan berkelanjutan. Hingga 2025 NDB telah menyalurkan lebih dari US\$ 15 miliar bagi berbagai proyek di negara anggota. Selain itu BRICS juga membentuk *Contingent Reserve Arrangement (CRA)* senilai US\$ 100 miliar sebagai cadangan keuangan kolektif untuk menghadapi gejolak nilai tukar dan krisis likuiditas. Dari perspektif perdagangan, BRICS secara konsisten berupaya memperkuat konektivitas pasar internal dengan mendorong mata uang lokal dalam transaksi yang disebut dengan strategi dedolarisasi. Langkah ini

tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, tetapi menurunkan resiko volatilitas nilai tukar. Upaya ini didukung oleh inisiatif menciptakan sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi di antara anggota sehingga efisiensi dan keamanan transaksi dapat terjamin. Secara keseluruhan hubungan ekonomi di dalam BRICS mencerminkan orientasi strategis untuk membangun kekuatan kolektif yang mampu bersaing di pasar global. Dengan populasi gabungan lebih dari 3,6 miliar jiwa dan kontribusi terhadap PDB dunia yang mencapai lebih dari 25%, blok ini memiliki daya tawar yang signifikan. Sinergi yang terbentuk melalui hubungan ekonomi tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masing-masing anggota, tetapi juga membuka peluang bagi terbentuknya sistem ekonomi global yang lebih seimbang dan multipolar.

BRICS adalah gabungan kekuatan ekonomi yang heterogen namun saling melengkapi, setiap negara membawa keunggulan komparatif dan kepentingan strategisnya masing-masing yang apabila dikombinasikan membentuk kapasitas kolektif besar untuk mempengaruhi perekonomian global. Peran ekonomi masing-masing anggota tidak hanya terlihat dari kontribusi terhadap PDB BRICS tetapi juga dari sektor unggulan, pengaruh di pasar internasional, dan kontribusi dalam agenda kerja sama blok. China menjadi penggerak utama dalam BRICS dengan kontribusi lebih dari separuh total PDB blok ini. Perekonomian China mengandalkan basis industri manufaktur berskala besar, sektor teknologi tinggi, dan ekspor yang merambah hampir semua pasar dunia. Negara ini juga memimpin dalam pengembangan kecerdasan buatan, jaringan telekomunikasi generasi kelima (5G), serta teknologi energi terbarukan. Dalam konteks BRICS China tidak hanya menjadi pemasok barang industri dan modal, tetapi juga penyandang dana utama bagi *New Development Bank (NDB)*. Kepemimpinannya dalam inisiatif dedolarisasi melalui promosi penggunaan yuan untuk memperkuat posisi China sebagai pusat gravitasi ekonomi blok ini. India negara yang menyandang status sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang berarti pasar domestik yang luas dan sumber daya manusia yang berlimpah. Pertumbuhan ekonominya bertumpu pada sektor teknologi informasi, industri farmasi, layanan digital, dan manufaktur ringan. India menjadi

penggerak utama kerja sama BRICS dibidang digitalisasi, termasuk pengembangan *ecommerce* lintas batas dan pusat inovasi bersama.

Selain itu negara ini aktif mempromosikan agenda energi bersih dan transisi menuju ekonomi hijau yang menjadikannya mitra penting dalam diversifikasi agenda kerja sama ekonomi BRICS. Brazil memainkan peran vital sebagai pemasok komoditas pertanian seperti kedelai, kopi, gula, dan daging sapi yang dibutuhkan oleh pasar dalam dan luar BRICS. Di sektor energi Brazil memimpin produksi bioethanol dan menjadi pelopor pemanfaatan bioenergi berkelanjutan. Peran ini menjadikannya sebagai sumber ketahanan pangan dan energi terbarukan bagi BRICS. Selain itu sebagai kekuatan terbesar di Amerika Latin Brazil membuka akses bagi BRICS ke pasar regional yang kaya sumber daya dan potensi investasi. Russia adalah salah satu pemasok energi terbesar dunia dengan ekspor minyak, gas alam, dan batu bara yang menjadi tulang punggung perdagangan global BRICS. Selain itu Russia memiliki cadangan logam strategis seperti nikel, palladium, dan uranium yang penting bagi industry teknologi tinggi dan energi nuklir. Posisi Russia di BRICS ditandai dengan dorongannya terhadap pembentukan sistem pembayaran alternatif yang mampu meminimalisasi pengaruh sanksi ekonomi barat, serta memastikan kelancaran perdagangan antar anggota. Afrika Selatan memiliki peran strategis sebagai pintu masuk BRICS ke benua Afrika, negara ini kaya akan sumber daya mineral seperti emas, platinum, dan berlian, sekaligus memiliki jaringan logistik yang memadai untuk distribusi ke negara-negara Afrika Sub-Sahara. Afrika Selatan aktif mendorong kerja sama Pembangunan infrastruktur dan investasi di Afrika, sejalan dengan agenda BRICS untuk memperkuat hubungan *South-South Cooperation*. Walaupun dengan skalan ekonominya yang lebih kecil dibanding dengan anggota lain, posisi di kawasan menjadikannya mitra penting dalam memperluas pengaruh BRICS. Secara kolektif kelima negara ini menciptakan kombinasi kekuatan yang mencakup hampir seluruh sektor strategis seperti manufaktur dan teknologi (China dan India), ketahanan pangan dan energi terbarukan (Brazil), pasokan energi fosil dan logam strategis (Russia), serta akses pasar kawasan Afrika (Afrika Selatan). Diversifikasi ini memberi BRICS fleksibilitas dalam

mengembangkan rantai pasok internal yang relatif mandiri dari pengaruh ekonomi barat. Namun perbedaan tingkat ekonomi dan kepentingan nasional tetap menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi kebijakan yang erat untuk menjaga peran di dalam blok.

3. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Indonesia Bergabung BRICS

Aspek ekonomi menjadi salah satu pendorong paling dominan dalam keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan PDB, menyediakan lapangan kerja, serta memperluas pasar ekspor. Dalam konteks ini BRICS dipandang sebagai platform strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui akses pembiayaan alternatif, diversifikasi perdagangan, dan integrasi dengan jaringan ekonomi negara-negara berkembang lainnya. Dalam dimensi ekonomi dari sisi pertumbuhan PDB Indonesia berada pada jalur moderat dengan rata-rata proyeksi pertumbuhan sekitar 5% per tahun pada periode 2024-2026.

Angka ini relatif stabil namun masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian pasar di negara maju. Melalui BRICS Indonesia berharap dapat memperoleh dukungan dalam bentuk stabilitas perdagangan, peningkatan permintaan ekspor dan integrasi dengan pasar besar seperti China, India, dan Russia. Negara tersebut menyumbang lebih dari 40% populasi dunia sehingga menjadi pasar potensial yang sulit diabaikan.

Selanjutnya mengenai pembiayaan pembangunan yang menjadi urgensi lain, Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar dalam kebutuhan infrastruktur, baik di bidang transportasi, energi, maupun digitalisasi. Bergabung dengan BRICS memberi peluang untuk mengakses *New Development Bank* (NDB) yang telah menyalurkan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur di negara anggota. Dengan pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga barat seperti IMF atau Bank Dunia, Indonesia dapat mempercepat pembangunan proyek strategis seperti energi terbarukan, kereta cepat, dan infrastruktur digital. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.

Dari sisi perdagangan internasional bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia memperluas akses ekspor ke negaranegara non tradisional. Selama ini ekspor Indonesia masih bergantung pada pasar Amerika Serikat, Jepang, dan China, melalui perdagangan intra-BRICS yang difasilitasi oleh kebijakan preferensial Indonesia berpotensi meningkatkan penjualan komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, karet, tekstil, dan produk perikanan ke pasar Brazil, Russia, maupun Afrika Selatan. Diversifikasi pasar ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional dan memperkuat kemandirian ekonomi. Selanjutnya BRICS juga membuka peluang dalam deolarisasi perdagangan. Dengan meningkatnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antar anggota, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS hal ini bermanfaat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan fleksibilitas moneter, dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah volatilitas pasar global.

Selain pertimbangan ekonomi aspek politik juga menjadi landasan penting yang mendorong Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Faktor politik ini terutama berkaitan dengan visi pembangunan nasional, kebutuhan memperkuat posisi tawar global, serta upaya diversifikasi aliansi internasional. Visi pembangunan nasional yang diusung oleh Prabowo Subiatno menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan sekaligus aktor penting di panggung global. Hal ini tercermin dalam agenda pembangunan jangka menengah yang berfokus pada swasembada pangan, kemandirian energi, transformasi digital, serta percepatan industrialisasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukannya dukungan eksternal berupa akses teknologi, pasar yang lebih luas, dan mitra kerja sama yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks inilah BRICS menjadi relevan karena menyediakan forum alternatif yang lebih inklusif bagi negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya di luar dominasi barat. Di sisi lain posisi tawar Indonesia dalam politik global juga menjadi pertimbangan strategis. Selama beberapa dekade terakhir, arsitektur keuangan dan politik internasional masih didominasi oleh negara maju melalui forum seper G7,

IMF, atau Bank Dunia. Dengan masuknya Indonesia ke BRICS pemerintah berharap dapat memperkuat daya negosiasi dalam isu-isu global, Indonesia di BRICS tidak hanya meningkatkan reputasi diplomasi bebas aktif, tetapi juga memperluas ruang pengaruh Indonesia dalam persaingan geopolitik multipolar.

Selain itu terdapat kebutuhan untuk mendiversifikasi aliansi internasional. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak ingin sepenuhnya bergabung pada satu blok tertentu baik barat maupun timur. Dengan bergabung ke BRICS Indonesia berupaya mengimbangi hubungan internasional melalui kerja sama yang lebih luas dan tidak terbatas pada mitra tradisional. Hal ini juga memungkinkan Indonesia memainkan peran sebagai jembatan antara *Global South dan Global North*, sekaligus mempertegas identitas politik luar negeri yang independent namun tetap konstruktif. Dengan demikian faktor politik memberikan dorongan signifikan dalam akses Indonesia ke BRICS. Pada kepemimpinan Prabowo Subianto, politik luar negeri lebih diarahkan pada pendekatan pragmatis, menjaga kemandirian, tetapi tetap memanfaatkan peluang global demi kepentingan nasional dengan konsep kebijakan luar negeri bebas aktif yang diinterpretasikan secara adaptif terhadap tantangan kontemporer yang di mana kepentingan domestic dan peluang internasional dipadukan secara sinergis. Pada dasarnya ketika dilihat dari faktor ekonomi saja tidak cukup menjelaskan keseluruhan fenomena ini. Faktor politik yang berkaitan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memainkan peran sentral. Prabowo hadir dengan narasi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara sekaligus aktor penting dalam persaingan global. Agenda pembangunan yang menekankan swasembada pangan, industrialisasi, kemandirian energi, dan transformasi digital membutuhkan dukungan politik luar negeri yang mampu membuka akses sumber daya dan mitra strategis. Di sinilah BRICS menawarkan peluang untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam politik global. Selama ini arsitektur internasional didominasi oleh negara-negara maju melalui forum seperti G7, IMF, atau Bank Dunia. Dengan bergabung ke dalam BRICS,

Indonesia tidak hanya memperoleh akses ekonomi, tetapi juga legitimasi politik untuk bernegosiasi dalam forum internasional dengan posisi yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah lama menjadi ciri khas diplomasi Indonesia, tetapi kini dimaknai secara lebih pragmatis oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Faktor politik ini erat kaitannya dengan konsep kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri bukan hanya alat untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga sarana strategis untuk mendorong pembangunan nasional. Dalam hal ini keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS dapat dilihat sebagai ekspresi nyata dari diplomasi ekonomi, di mana hubungan internasional dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat konkret bagi pembangunan domestik.

Selain faktor ekonomi dan politik, diplomasi juga menjadi salah satu pilar utama yang mendorong Indonesia bergabung dengan BRICS. Kemitraan Indonesia dalam BRICS tidak semata-mata berhubungan dengan aspek ekonomi dan politik, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas nasional serta cara Indonesia memosisikan diri di kancah internasional. Identitas nasional memiliki peran penting dalam diplomasi karena menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan strategi kerja sama internasional. Dalam kerangka ini keputusan bergabung dengan BRICS dapat dipandang sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan menengah (*Middle Power*) yang memiliki pengaruh dalam dinamika global maupun regional. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara sekaligus anggota G20, Indonesia berkepentingan agar suaranya didengar dalam forum internasional, terutama di tengah tatanan global yang cenderung dikuasai oleh negara-negara maju. Dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia dapat menunjukkan bahwa ia bukan hanya pengikut dalam sistem internasional, tetapi juga aktor yang aktif dalam membentuk arsitektur ekonomi dan politik global yang lebih inklusif bagi negara-negara berkembang.

Dari sisi diplomasi keikutsertaan dalam BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas jaringan kemitraan di luar hubungan tradisional dengan barat maupun dengan sesama anggota ASEAN. Hal ini

sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yakni tidak terjebak dalam rivalitas blok-blok kekuatan besar, melainkan mencari keseimbangan dalam setiap hubungan internasional. Melalui BRICS Indonesia dapat meningkatkan kerja sama strategis dengan negara-negara seperti China, India, Brazil, Russi, dan Afrika Selatan di berbagai bidang mulai dari perdangan, investasi, hingga inovasi teknologi. Salah satu contohnya adalah proyek kereta cepat JakartaBandung yang memperlihatkan bagaimana Indonesia memanfaatkan kemitraan dengan anggota BRICS untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Selain itu dalam diplomasi multilateral BRICS memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam isuisu global seperti perubahan iklim, reformasi sistem keuangan internasional, dan ketahananpangan. Indonesia dapat menjalin kolaborasi dengan Brazil dalam upaya mengatasi deforestasi serta menjaga kelestarian hutan tropis yang penting bagi keseimbangan ekosistem dunia.

Di bidang energi Indonesia juga berpotensi bekerja sama dengan Russia dalam pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Keikutsertaan dalam BRICS dapat memperkuat citra Indonesia sebagai salah satu pemimpin negara berkembang. Dengan populasi terbesar keempat di dunia serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara dengan kekuatan-kekuatan besar dalam BRICS. Oleh karena itu langkah Indonesia bergabung dengan BRICS tidak hanya menggambarkan kepentingan ekonomi dan politik, melainkan juga strategi diplomasi jangka panjang untuk memperkuat identitas nasional di tingkat global sekaligus membangun aliansi yang sejalan dengan kepentingan strategisnya. Dalam dua dekade terakhir, sistem internasional masih sangat dipengaruhi oleh dominasi negara-negara barat, terutama melalui lembaga lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan G7. Struktur tata kelola global yang cenderung bias terhadap kepentingan negara maju menimbulkan keterbatasan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan

ekonominya. Kondisi ini semakin terasa ketika ketegangan geopolitik meningkat, misalnya akibat perang Russi-Ukraina, konflik dagang Amerika Serikat dengan China dan ketidakstabilan pasar energi global. Konteks ini memberikan pandangan sebagai BRICS wadah alternatif yang menawarkan format kerja sama lebih inklusif bagi negara-negara berkembang. Pergeseran menuju tatanan multipolar mendorong Indonesia untuk mencari posisi strategis di luar jangkauan kekuatan barat. Dengan bergabung ke dalam BRICS Indonesia berharap dapat memperkuat daya tawar politik sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari pergeseran keseimbangan global tersebut. Indonesia juga memiliki pertimbangan politik dan strategis dalam bergabung dengan BRICS, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara Indonesia memiliki visi untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan global, termasuk dalam reformasi tata kelola ekonomi dunia yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. BRICS sering mengkritik dominasi negara-negara barat dalam mengambil keputusan ekonomi global dan mendorong sistem multipolar yang lebih inklusif. Kemitraan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan menjadikannya jembatan antara negara-negara berkembang dengan ekonomi besar dunia. Kondisi konstelasi global yang masih didominasi oleh negara-negara barat melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan kelompok G7 menjadi faktor eksternal yang mendorong Indonesia masuk ke dalam BRICS. Struktur tata global selama beberapa dekade terakhir dinilai kurang inklusif terhadap kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakseimbangan ini mendorong negara-negara berkembang mencari platform alternatif yang mampu memberikan ruang diplomasi ekonomi yang lebih setara. BRICS hadir sebagai forum yang memfasilitasi pembiayaan pembangunan melalui *New Development Bank (NDB)*, penggunaan Cadangan kontinjensi (CRA), serta pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi antara anggota untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Melalui mekanisme ini Indonesia berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan peran dalam arsitektur global yang lebih adil. Dalam perspektif liberalism keputusan Indonesia mencerminkan upaya negara

memaksimalkan keuntungan ekonomi transnasional dan membuka akses ke sumber daya pembangunan global. Selain dengan adanya dinamika global perkembangan internal BRICS juga memberikan daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah keberadaan *New Development Bank* (NDB). Bank ini dibentuk untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan barat. Hingga 2025 *New Development Bank* telah menyalurkan lebih dari US\$ 15 miliar termasuk untuk proyek energi hijau dan transportasi massal. Bagi Indonesia keanggotaan dalam *New Development Bank* sangat penting karena kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional masih sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya ditutup melalui APBN. Selain itu BRICS juga memiliki mekanisme *Contingent Reserve Arrangement* (CRA) senilai US\$ 100 miliar sebagai pengaman likuiditas. Bagi Indonesia sendiri akses ke CRA berarti ketersediaan Cadangan devisa tambahan untuk menghadapi gejolak internal tanpa harus selalu bergantung pada dolar AS atau intervensi IMF.

Di bidang perdagangan BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antar anggota. Inisiatif ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sekaligus memperkuat kedaulatan finansial melalui peningkatan peran rupiah dalam perdagangan internasional. Hal ini penting mengingat sekitar 80% transaksi global masih didominasi dolar AS, yang membuat negara-negara berkembang rentan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. BRICS juga membuka pasar baru bagi ekspor Indonesia, selama ini ekspor Indonesia masih bergantung pada mitra utama yaitu Amerika Serikat, Jepang, China.

Melalui kerja sama intra-BRICS Indonesia berpeluang memperluas pasar ke Russia, Brazil, dan Afrika Selatan untuk komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, Batubara, tekstil, dan produk perikanan. Diversifikasi mitra dagang ini strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi resiko dari ketergantungan pada pasar tradisional. Lebih jauh BRICS kini berfungsi sebagai forum diplomatic alternatif dengan bergabungnya ke dalam BRICS Indonesia tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi.

Namun Indonesia juga dapat memengaruhi diskusi global mengenai tata kelola dunia. Ekspansi BRICS pada tahun 2024-2025 yang melibatkan Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, dan Indonesia memperlihatkan bahwa koalisi ini bertransformasi menjadi representasi kepentingan negara-negara *Global South*. Keberadaan Indonesia di dalamnya memperluas legitimasi BRICS sebagai wadah solidaritas negara berkembang. Bagi Indonesia BRICS memberikan berbagai peluang, seperti pembiayaan infrastruktur melalui NDB, peningkatan preferensial intra-blok, dan akses terhadap teknologi melalui kemitraan strategis dengan negara-negara anggota. Namun, dinamika internal BRICS tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Dominasi ekonomi Tiongkok yang menguasai sekitar 58% dari total PDB anggota BRICS sering memengaruhi arah kebijakan blok, sementara perbedaan kepentingan antarnegara anggota dapat menghambat tercapainya kesepakatan strategis. Dalam konteks ini, Teori Interdependensi Kompleks dari Robert Keohane dan Joseph Nye memberikan pemahaman bahwa meskipun negara-negara anggota saling bergantung secara ekonomi, hubungan tersebut juga diwarnai oleh asimetri kepentingan. Oleh karena itu, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS didasarkan pada pertimbangan pragmatis: memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, sambil mengantisipasi risiko geopolitik dan dominasi kekuatan besar dalam blok tersebut.

Selain faktor konstelasi global, dinamika BRICS, dan pergeseran tatanan multipolar, faktor eksternal lain yang turut mendorong Indonesia bergabung ke dalam BRICS adalah dukungan global terhadap reformasi tata kelola ekonomi internasional. Selama beberapa dekade terakhir, struktur sistem keuangan dan perdagangan global masih didominasi oleh negara-negara Barat melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan kelompok G7. Dominasi ini seringkali dinilai tidak memberikan ruang yang memadai bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya, termasuk Indonesia.

Dalam konteks tersebut, BRICS hadir sebagai platform alternatif yang menawarkan mekanisme lebih inklusif melalui pembentukan New Development Bank (NDB), pemanfaatan Cadangan Kontinjensi (CRA), serta inisiatif penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan

antaranggota. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi masing-masing negara anggota. Dukungan negara-negara anggota BRICS dan mitra global terhadap agenda reformasi tata kelola ekonomi internasional membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi internasional serta memperluas akses terhadap pembiayaan pembangunan.

Dalam perspektif Teori Interdependensi Kompleks yang dikembangkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, kondisi ini mencerminkan bahwa hubungan antarnegara modern tidak lagi semata ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan melalui ketergantungan multidimensi dalam aspek ekonomi, keuangan, teknologi, dan pembangunan. BRICS sebagai blok strategis mewartakan kepentingan negaranegara berkembang untuk membentuk arsitektur ekonomi global yang lebih adil dan inklusif. Bagi Indonesia, dinamika ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang semakin dimaknai secara pragmatis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui keanggotaan di BRICS, Indonesia tidak hanya mendapatkan peluang ekonomi dan akses pembiayaan pembangunan, tetapi juga memperoleh ruang manuver diplomatik yang lebih luas. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menempatkan dirinya sebagai aktor strategis dalam membangun tatanan global multipolar sekaligus menjadi jembatan antara negara-negara berkembang di Global South dan kekuatan ekonomi utama di Global North.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mendorong Indonesia bergabung dalam BRICS pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan

bahwa keputusan Indonesia untuk menjadi anggota BRICS merupakan hasil dari kombinasi faktor ekonomi, politik, diplomasi, dan dinamika global yang saling berkaitan. Dari sisi ekonomi, Indonesia menilai bahwa BRICS memberikan peluang strategis dalam diversifikasi pasar ekspor, peningkatan investasi asing, serta akses terhadap pembiayaan pembangunan melalui New Development Bank (NDB). Selain itu, keanggotaan BRICS diharapkan mampu memperkuat stabilitas makroekonomi nasional melalui mekanisme Cadangan Kontinjensi (CRA) serta mengurangi ketergantungan pada dominasi mata uang dolar Amerika Serikat. Dari sisi politik, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan posisi tawar Indonesia dalam sistem internasional melalui strategi diversifikasi aliansi dan peningkatan peran dalam forum multipolar. Selanjutnya, faktor diplomasi menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memperluas jaringan kerja sama internasional, terutama dengan negaranegara berkembang, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan antara Global South dan Global North. Adapun dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara negara Barat dan Rusia serta munculnya tatanan multipolar, semakin memperkuat urgensi Indonesia untuk mencari alternatif kerja sama internasional yang lebih inklusif. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat dipahami sebagai langkah strategis jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat legitimasi politik luar negeri dan memperluas peran Indonesia dalam percaturan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Constructing global order: Agency and change in world politics*. Cambridge University Press.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- BRICS. (2024). *BRICS Summit 2024: Declaration on partnership for inclusive global development*. Retrieved from <https://brics2024.gov>
- Gumilang, F. (2025, January 7). Indonesia resmi bergabung dengan BRICS: Apa dampaknya bagi ekonomi? *Kumparan*. Retrieved from <https://kumparan.com>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Longman.
- LPEM UI. (2025). *Akses BRICS: Potensi dan tantangan bagi perekonomian Indonesia*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia. Retrieved from <https://lpem.org/aksesi-brics>
- Moravcsik, A. (1997). Taking preferences seriously: A liberal theory of international politics. *International Organization*, 51(4), 513–553. <https://doi.org/10.1162/002081897550447>
- Nye, J. S. (2021). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects: Navigating a multipolar world*. Washington, D.C.: World Bank. Retrieved from <https://www.worldbank.org>